MA'HAD 'ALY DARUSY SYAHADAH
LI TA'HIL AL-MUDARRISIN
Gunungmadu, Gumukrejo, Kedunglengkong, Kec. Simo,
Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57377

Barak Militer dan Pesantren: Analisis Polemik Kebijakan Kang Dedi Mulyadi dalam Pendidikan Ulang Karakter Remaja dan Pesantren Sebagai Solusi

Muhammad Basyir Abdul Majid

basyirm059@gmail.com

Abstract: This study analyzes the controversy surrounding the policy of sending troubled students to military barracks, a proposal initiated by Dedi Mulyadi in West Java in 2025. Using a qualitative literature review method, this article explores the debate between the pro-camp, which emphasizes discipline and deterrence, and the anti-camp, which highlights the risks of psychological trauma and violations of children's rights. The findings reveal a clash of paradigms between an institutional militaristic approach and the need for holistic pedagogical care. As an alternative, this study proposes a pesantren-based educational model within an Islamic educational framework. This model is considered capable of integrating strict discipline with moral-spiritual development without neglecting the psychological aspects of adolescents. In conclusion, Islamic boarding schools can serve as a more humane and sustainable solution to address adolescent moral decline compared to the military barracks model.

Keywords: Military Barracks, Character Education, Adolescents, Islamic Boarding Schools, Islamic Education.

Abstrak: Penelitian ini menganalisis polemik kebijakan pengiriman siswa bermasalah ke barak militer yang digagas oleh Dedi Mulyadi di Jawa Barat pada tahun 2025.

Menggunakan metode studi pustaka kualitatif, artikel ini mengeksplorasi perdebatan antara kubu pro yang menekankan kedisiplinan dan efek jera, dengan kubu kontra yang menyoroti risiko trauma psikologis serta pelanggaran hak anak. Hasil penelitian menunjukkan adanya benturan paradigma antara pendekatan militeristik institusional dengan kebutuhan pedagogis holistik. Sebagai alternatif, penelitian ini menawarkan model pendidikan berbasis pesantren dalam perspektif pendidikan Islam. Model ini dinilai mampu mengintegrasikan disiplin ketat dengan pengembangan moral-spiritual tanpa mengabaikan aspek psikologis remaja. Kesimpulannya, pesantren dapat menjadi solusi penanganan dekadensi moral remaja yang lebih humanis dan berkelanjutan dibandingkan model barak militer.

Kata Kunci: Barak Militer, Pendidikan Karakter, Remaja, Pesantren, Pendidikan Islam.

PENDAHULUAN

Pada pertengahan tahun 2025, tepatnya di bulan Mei, salah seorang gubernur di wilayah Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang lebih akrab dipanggil KDM menggagas program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer. Program ini kemudian memicu perdebatan luas di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan pendidikan.[1] Kebijakan ini awalnya ditujukan untuk siswa yang terlibat dalam kenakalan remaja seperti tawuran dan geng dengan tujuan membentuk kedisiplinan dan karakter melalui pembinaan di lingkungan barak militer selama enam bulan.[2] Dedi Mulyadi menegaskan

[1]Nailin In Saroh, "DPR: Mengirim Siswa Bermasalah ke Barak Militer Bukan Jawaban, Butuh Pendekatan Holistik" [Berita Online voi.id 30 April 2025, 10:15 WIB] tersedia di situs: https://voi.id/berita/479125/dpr-mengirim-siswa-bermasalah-ke-barak-militer-bukan-jawaban-butuh-pendekatan-holistik, diakses tanggal 22 Januari 2026

[2]Enza, **"**Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kirim pelajar 'bandel' ke barak militer – Apa akibatnya?" [Berita Online BBC News Indoneisa 6 Mei 2025] tersedia di situs: https://www.bbc.com/indonesia/articles/c7932qp4n2ro, diakses tanggal 22 Januari 2026

bahwa program ini bukan pelatihan militer, melainkan pembinaan karakter, mental, dan kebugaran pelajar, serta tetap mempertahankan kegiatan belajar mengajar seperti biasa dengan guru dari sekolah asal.[3]

Pelaksanaan program ini dimulai pada 2 Mei 2025 di beberapa daerah di Jawa Barat yang dianggap rawan, seperti Purwakarta dan Bandung. Siswa yang mengikuti program ini dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua, dengan prioritas pada mereka yang sulit dibina atau terlibat dalam perilaku menyimpang.[4] Selama mengikuti program, siswa tetap mendapatkan pendidikan formal dengan materi pelajaran yang sesuai dengan kurikulum sekolah asal.[5]

Namun, kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengingatkan bahwa setiap anak, termasuk yang bermasalah, memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan pendekatan militeristik seharusnya menjadi opsi terakhir setelah semua metode pembinaan lain telah dicoba.[6] Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, menyatakan bahwa penguatan karakter siswa khususnya siswa bermasalah bukan dengan cara dididik secara militeristik, dan menekankan perlunya pendekatan holistik yang

[3]Nailin In Saroh, "Dedi Mulyadi Tegaskan Program Barak Militer Bukan Pelatihan Barak Militer" [Berita Online voi.id 30 April 2025 08:06 WIB] tersedia di situs: https://voi.id/berita/479078/dedi-mulyadi-tegaskan-program-barak-pelajar-bukan-pelatihan-militer diakses tanggal 22 Januari 2026

[4]Galuh Farida, Mulai 2 Mei 2025, "Dedi Mulyadi Akan Kirim Siswa Bermasalah ke Barak Militer" [Berita Online editorindonesia.com 2 Mei 2025, 13:14 WIB] tersedia disitus: https://editorindonesia.com/mulai-2-mei-2025-dedi-mulyadi-akan-kirim-siswa-bermasalah-ke-barak-militer/, diakses tanggal 22 Januari 2026

[5]Eris Eka Jaya, "30 Peserta Akan Jadi Percontohan Dedi Mulyadi Kirim Siswa ke Barak Militer" [Berita Online Bandung.Kompas.com 1 Mei 2025, 05:31 WIB] tersedia di situs: https://bandung.kompas.com/read/2025/05/01/053143278/30-peserta-akan-jadi-percontohan-dedi-mulyadi-kirim-siswa-ke-barak-militer, diakses tangal 22 Januari 2026

[6]CNN Indonesia, "KPAI Desak Dedi Mulyadi Hentikan Pengiriman Siswa ke Barak Militer" [Berita Online CNN Indonesia 26 Maret 2025, 14:17 WIB] tersedia di situs: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250526133607-20-1233264/kpai-desak-dedi-mulyadi-hentikan-pengiriman-siswa-ke-barak-militer, diakses tanggal 22 Januari 2026

melibatkan berbagai aspek, termasuk keluarga dan lingkungan sosial.[7]

Selain itu, pengamat kebijakan pendidikan dari Universitas Pendidikan Indoneisa (UPI), Cecep Darmawan, menyatakan bahwa rencana Dedi Mulyadi menerapkan wajib militer membutuhkan persyaratan khusus dan kewenangan menerapkan wajib militer untuk siswa SMA/SMK seharusnya ada di tangan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Ia juga menyoroti bahwa sebelum ide menerapkan wajib militer itu terlontar, sebenarnya sudah ada pendidikan bela negara yang bertujuan meningkatkan patriotisme, nasionalisme, dan bela Tanah Air.[8]

Meskipun demikian, ada juga dukungan terhadap program ini. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menyatakan bahwa ia akan mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan Dedi secara nasional, dengan alasan bahwa anak-anak yang suka membuat kekacauan dan terlibat dalam perkelahian jalanan perlu dilatih oleh Tentara Nasional Indonesia untuk membentuk mentalitas, karakter, dan disiplin mereka.[9] Dedi Mulyadi menghargai kritik yang diterimanya terkait program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer. Ia menyatakan keyakinannya bahwa semua kritik didasarkan pada kepedulian terhadap anak-anak dan remaja untuk masa depan mereka yang lebih baik, dan mengatakan bahwa ia terbuka untuk kolaborasi dalam menyelesaikan masalah ini. Hal ini disampaikan Dedi melalui akun Instagram resminya,

[7]NailinIn Saroh, Loc.cit.
[8]Akmal Firmansyah, “Ide Wamil ala Dedi Mulyadi Bukan Solusi Bangun Karakter Pelajar” [Berita Online Tirto.id 28 Februari 2025 12:00 WIB] tersedia di situs: https://tirto.id/ide-wamil-ala-dedi-mulyadi-bukan-solusi-bangun-karakter-pelajar-g8RK, diakses tanggal 22 Januari 2026
[9]Dedi Leni Mardianti, “Alasan Menteri HAM Dukung Program Dedi Mulyadi Kirim Anak Nakal ke Barak” [Berita Online Tempo 13 Mei 2025, 08:18 WIB] tersedia di situs: https://www.tempo.co/politik/alasan-menteri-ham-dukung-program-dedi-mulyadi-kirim-anak-nakal-ke-barak-1423932 diakses tanggal 22 Januari 2026

@dedimulyadi7, pada 19 Mei 2025. Dalam pernyataannya, Dedi menyampaikan apresiasinya atas perhatian yang diberikan KPAI dan mengakui bahwa lembaga tersebut memiliki kompetensi dalam perlindungan anak. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan ini lahir dari kondisi darurat akibat keterbatasan orang tua dalam menangani anak-anak mereka yang terlibat kenakalan remaja. Dedi mengajak KPAI untuk berkolaborasi mengatasi persoalan sosial anak-anak di Jawa Barat.[10]

Dengan begitu banyaknya polemik yang hadir, jurnal ilmiah ini dituliskan dengan tujuan membangun opini di antara puluhan pendapat pro-kontra atas putusan barak militer. Bukan hanya mengkomparasikan keduanya, dengan mencari serta menganalisa setiap pendapat ahli terdahulu maupun sekarang dalam bentuk gagasan hingga ulasan. Adapun penelitian terdahulu dalam pembahasan ini dilakukan oleh Khairul Fahruzy dengan cakupan berupa efektivitas program barak militer, menekankan akan diperlukannya pelatihan bagi para tenaga pengajar demi meyiapkan generasi penerus bangsa.[11] Penelitian lain dilakuka oleh Nurmu'izzatun berupa analisis barak militer melalui gagasan Lawrence Kohlberg, menitik beratkan pada pengembangan moral peserta didik dan menyatakan akan barak militer dapat menjadi sarana refleksi dan pengalaman kolektif terstruktur.[12] Serta penelitian akan pengawasannya dari segi kebijakan politik dalam tata kelola sarana program barak militer oleh Edward Benedictus Roring.[13]

---

[10]Ahmad Rif'an Muzaqi, "Program Pembinaan Siswa di Barak Militer Dikritik, Dedi Mulyadi Ajak KPAI Terlibat Langsung" [Berita Online Fajar.co.id 19 Mei 2025, 15:51 WIB] tersedia di situs: https://fajar.co.id/2025/05/19/program-pembinaan-siswa-di-barak-militer-dikritik-dedi-mulyadi-ajak-kpai-terlibat-langsung/ diakses tanggal 22 Januari 2026

[11]Khairul Fahruzy, et al., "Efektivitas Program Barak Militer Solusi Untuk Mengatasi Siswa/Remaja Bermasalah di Provinsi Jawa Barat, *"Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* Vol. 10, no. 02 (2025): 1-3

[12]Nurmu'izzatin Zaharatul Parhi, "Analisis Gagasan Kang Dedi Mulyadi tentang Pendidikan Karakter Remaja melalui Model Barak Militer, *"Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol. 13, no. 01 (2025): 1-3

[13]Edward Benedictus Roring, "Tata Kelola dan Kebijakan Pengawasan Birokrasi Pemerintah Jawa Barat dalam Pelaksanaan Program Pembinaan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan analisis komparatif kualitatif. Data diperoleh dari berbagai sumber, meliputi jurnal, berita-berita faktual, cuitan di media sosial, hingga hasil wawancara tokoh berpengaruh atas putusan barak militer. Data yang terkumpul kemudian diolah secara sistematis melalui penyaringan akan kebenaran data, dan kemudian dirumuskan atau diklasifikasikan berdasarkan variabel tertentu untuk dikomparasikan demi melahirkan data yang lebih konkret dan interaktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Barak Militer

Barak militer merupakan padanan kata atau frasa yang berasal dari barak dan militer. Dengannya, dua kata ini memiliki makna yang saling kerkaitan satu dengan yang lainnya. Kata barak secara sendiri merupakan kata resapan dari bahasa inggris yaitu ; *barrack,* yang merujuk kepada tempat tinggal berupa asrama bagi para tentara maupun polisi.[14] Sedangkan dalam versi indonesia, kata barak atau tangsi dapat memiliki makna yang lebih luas, yaitu tempat di mana para tentara, polisi, para pasien pesakitan ataupun penjahat berkumpul.[15] Apapun itu, kata barak memiliki satu makna yang sama berupa asrama, maka kata selanjutnya menjadi pelengkap atas ketidak stabilan makna yang ada, berupa kata militer. Secara lebih lanjut makna barak militer mengacu pada asrama di mana para staf militer tinggal dalam lingkungan tata tertib serta peraturan dibuat secara ketat dengan tujuan yang mereka inginkan.[16]

Anak di Barak Militer, *"Jurnal Perspektif Administrasi Publik dan Hukum* Vol. 2, no. 3 (2025): 3-6

[14]Merriam-Webster, "Barrack," Merriam-Webster *Dictionary*, 2026, https://www.merriam-webster.com/dictionary/barrack, diakses tanggal 28 Februari 2026

[15]Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Barak," *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, 2026, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/barak, diakses tanggal 28 Februari 2026

Dalam masyarakat indonesia hari ini, barak militer menjadi topik pembahasan yang cukup hangat belum lama ini. Hal ini disebabkan pengambilan keputusan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau akrab dipanggil Kang Dedi, bahwa bagi setiap anak remaja di daerah Jawa Barat yang terindikasi sebagai nakal akan dikirimkan ke barak militer dalam waktu yang ditentukan guna pendisiplinan atau pendidikan ulang karakter remaja.[17]

Pengambilan keputusan ini secara sekilas mirip dengan model *correctional boot camps* di negara canada dan sekitarnya. Kamp koreksi ini menjujung visi yang sama, berupa pendidikan ulang karakter. Kamp koreksi merupakan sebuah program yang diusung oleh sebagian penjara di negara bagian sebagai solusi alternatif dalam menurunkan tindak kriminalitas *(mitigating residivism & reduce crime)*. Yang partisipannya berasal dari para narapidana penjara dengan kemauan untuk berubah menjadi lebih baik. Dan tentunya suasana kehidupan di dalamnya tetap berbau militeristik dengan penambahan beberapa fasilitas khusus guna hiburan di antara narapidana. Program ini dikenal efektif meski di beberapa negara bagian lain memilih untuk memberhentikan atau bahkan menghapusnya dengan alasan pembengkakan biaya operasional atau alokasinya yang dinilai terlalu besar bagi sekelas pendidikan karakter para narapidana.[18]

Secara luas, keputusan barak militer dapat dirujuk kepada kebijakan beberapa negara konflik atau dalam bayangan konflik serupa dengan Korea Selatan, Suriname, dan Israel yang mewajibkan para golongan muda mereka untuk mengikuti Wajib

[16]Britannica Editors, "Barrack. Military Facilities Accommodations & Training" [Website Britannica 22 April 2026] tersedia di situs: https://www.britannica.com/topic/barracks diakses tanggal 23 April 2026
[17]Enza, Loc.cit.
[18]William J. Schultz Et al., "A Good Place To Do Time? Detailling the Construction of Symbolic Social Boundaries in Correctional Boot Camps, *"Jurnal Criminal Justice and Behavior* Vol. 51, No. 4 (2024): 11-12

Militer atau wamil.[19] Wajib militer jika ditarik tali ulur sejarahnya maka akan kembali di masa pemerintahan Napoleon Bonaparte di tanah Perancis, di mana warga secara massal didaftarkan untuk masuk ke dalam dunia militer. Hal ini dirancang selama masa Revolusi Perancis guna menghadang gangguan Monarki Eropa. Sehingga terciptalah sebutan *Grande Armée* atau "bangsa yang bersenjata" dalam sepak terjangnya, sekumpulan eks- petani dan penggembala ini mampu untuk memukul mundur pasukan Eropa dalam banyak pertempuran. Kebijakan ini nantinya akan banyak diadopsi oleh banyak negara setelahnya.[20]

Sejarah mencatat beberapa kejadian di mana kebijakan ini sempat menjadi prioritas bagi beberapa negara meski pada hari ini kebijakan tersebut telah dicabut. Seperti yang terjadi pada Amerika Serikat di Perang Dunia-1 di mana golongan muda saat itu berbondong-bondong mendaftarkan diri mereka guna mengikuti pertempuran di front barat dengan Kesultanan Utsmaniyah sebagai lawan tanding mereka.[21] Dan hal serupa juga terjadi pada masa Perang Dunia-2, di saat Inggris dan Uni Soviet memutuskan akan pengharusan kaum wanita dalam turut andil dalam peperangan.[22]

---

[19]Doonderdag, "PARAMARIBO - Suriname gaat halverwege volgend jaar de militaire dienstplicht opnieuw invoeren. Die zal gaan gelden voor mannen en vrouwen van 17 tot 26 jaar" [Website NU 1 Oktober 2010, 21:50 SRT] tersedia di situs: https://www.nu.nl/algemeen/2346876/suriname-voert-dienstplicht-weer-in.html , diakses tanggal 28 Februari 2026

[20]Jean Francois Brun, "5 – Napoleon's Grande Armée from Part II - The State of the Armed Forces" [Cambridge.org, 20 Desember 2022] tersedia di situs: https://www.cambridge.org/core/books/abs/cambridge-history-of-the-napoleonic-wars/napoleons-grande-armee/BA2410C86533CB4F13B8DD98FAC4E903 , diakses tanggal 28 Februari 2026

[21]Guide Federal Record, "Records of the Selective Service System (World War 1)" [Website National Archieve of the United States,] tersedia di situs: https://www.archives.gov/research/guide-fed-records/groups/163.html ,diakses tanggal 28 Februari 2026

[22]CBC News Online, "INDEPTH: Female Soldier. Women in the Military-International" [CBC News 30 Mei 2006] tersedia di situs: https://web.archive.org/web/20130518040804/http://www.cbc.ca/news/background/military-international/, diakses tanggal 28 Februari 2026

Pesantren dan Pendidikan

Istilah pesantren berasal dari kata “santri”, dengan awalan pe-dan akhiranan berarti tempat tinggal para santri. Kata “santri” juga merupakan penggabungan antara suku kata sant (manusia baik) dan tra (suka menolong), sehingga kata pesantren dapat diartikan sebagai tempat mendidik manusia yang baik. Secara istilah pesantren adalah lembaga pendidikan Islam, dimana para santri biasanya tinggal di pondok (asrama) dengan materi pengajaran kitab-kitab klasik dan kitab-kitab umum, yang bertujuan untuk menguasai Ilmu agama Islam secara detail serta mengamalkannya sebagai pedoman hidup dengan menekankan pentingnya moral dalam kehidupan bermasyarakat.[23]

Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang berbasis agama, pusat pengembangan, nilai-nilai dan penyiaran agama Islam. Kedudukan pesantren yang sangat penting membuatnya dapat terus bertahan hingga kini. Masyarakat membutuhkan pesantren sebagai kamp pembentukan moral dan pembina akhlak generasi muda saat ini. Penyebabnya dekadensi moral akibat arus globalisasi tengah menyerang generasi muda saat ini. Pesantren menjadi benteng terakhir pertahanan moral generasi muda. Pondok pesantren telah menghasilkan jutaan santri yang berkontribusi terhadap bangsa, baik sebagai para pejuang dan pahlawan, tokoh agama, tokoh politik, intelektual, pejabat publik, dan beragam profesi lainnya. Tak hanya sebagai tempat menimba ilmu keislaman, pesantren juga menjadi tempat membentuk karakter generasi bangsa. Pesantren menjadi sarana pembentukan akhlak dan etika yang baik.[24]

---

[23]Irfan Mujahidin, “Peran Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pengembangan Dakwah. *“ Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* Vol. 1, No. 1 (2021): 3-4

[24]MA. Achlani, HS, MA, *“*Peran Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Dakwah Sosial Dalam Menangkal Radikalisme dan Terorisme *“Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam* Vol. 1, No. 1 (2024): 2-3

Dedi Mulyadi

Dedi Mulyadi dikenal dalam masyarakat dengan sapaan kang Dedi atau diinisialkan menjadi KDM merupakan seorang politikus berkebangsaan Indonesia. Dia merupakan putra bungsu dari sembilan bersaudara. Ayahnya, Sahlin Ahmad Suryana merupakan Tentara Prajurit Kader sejak usia 28 tahun dan pensiun akibat sakit yang diderita sebagai dampak racun mata-mata kolonial. Ibunya, Karsiti yang tidak pernah mengenyam bangku sekolah adalah aktivis Palang Merah Indonesia. Dia sering membantu ibunya mengembala domba dan berladang.[25]

Saat menjadi bupati, Dedi Mulyadi membuat kebijakan dengan larangan berpacaran atau bertamu di atas jam 9 malam. Bagi pelanggar, atau masyarakat yang tidak patuh terhadap aturan tersebut, akan dihukum secara adat. Misalnya dengan diusir dari desanya dalam beberapa bulan, atau membayar denda dengan nominal yang ditentukan. Selain itu, akan dipasang juga kamera pengintai CCTV di setiap perbatasan desa sehingga peraturan tersebut dapat terealisasi dengan baik.[26]

Kepala Desa Cilandak, Dadan Jakaria sudah mendahului dengan cara membuat portal di semua jalan dan gang desa. Jika ada tamu yang waktu kunjung pacar, KTP, kartu mahasiswa, dan pelajarnya ditahan. Jika sudah lewat pukul 21.00, pihak lelaki (atau yang berkunjung) diusir.[27]

---

[25]Merdeka, “Profil Dedi Mulyadi” [Merdeka.com] tersedia di situs: https://www.merdeka.com/profil/indonesia/d/dedi-mulyadi, diakses tanggal 28 Februari 2026

[26]Dedi Priatmojo, “Kencan Hingga Malam di Purwakarta Akan Dinikahkan Paksa” [Viva.co.id 2 September 2015] tersedia di situs: https://web.archive.org/web/20161114083444/http://nasional.news.viva.co.id/news/read/668800-kencan-hingga-malam-di-purwakarta-akan-dinikahkan-paksa, diakses tanggal 28 Februari 2026

[27]Nanang Sutisna, “Bupati Purwakarta Larang Wakuncar di Atas Jam 21:00” [Tempo.co 1 September 2015] tersedia di situs: https://web.archive.org/web/20160127195736/http://nasional.tempo.co/read/news/2015/09/01/058696810/bupati-purwakarta-larang-wakuncar-di-atas-pukul-21-00, diakses tanggal 28 Februari 2026

Menurut Dedi, realisasi kebijakan ini nantinya di setiap desa atau kelurahan yang ada di Purwakarta, akan dibentuk kelompok yang bernama Badega Lembur bertugas melakukan pengawasan. Kebijakan itu akan digulirkan paling lambat pada bulan Oktober 2015. Menurutnya, aturan ini dilakukan sebagai antisipasi untuk menjaga akhlak para remaja, sehingga bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diharapkan.[28]

Kebijakan lainnya yang cukup menimbulkan kontroversi di kalangan pengusaha kecil adalah larangan usaha "permainan daring" dan *PlayStation*. Semua warung internet (warnet) yang ada di Purwakarta dilarang menyediakan layanan "permainan daring", dengan alasan berdampak pada sifat dan karakter anak/pelajar yang cenderung berperilaku negatif, namun tetap dapat dilakukan di rumah.[29]

Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter adalah bentuk sistem pendidikan yang menanamkan nilai-nilai karakter pada manusia, mencakup di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik dan diperuntukkan bagi generasi selanjutnya.Tujuan pendidikan karakter adalah untuk membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah hidup yang lebih baik.[30]

Yudi Latif menyebutkan pendidikan karakter sebagai ilmu amal (terapan) yang hanya diberikan untuk diamalkan. Menurutnya, guru harus mendidik (membudayakan) karakter melalui keteladanan dan peserta didik mempelajarinya dengan secara langsung mempraktikkan perilaku terpuji. Konsep karakter dapat mengekspresikan berbagai atribut, termasuk

[28]Ibid.
[29]Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan, Pengawasan, dan Pengendalian Usaha Warung Internet Serta Larangan Penyelenggaraan Usaha Game Online dan *PlayStation* di Kabupaten Purwakarta Pasal 6 Angka 4
[30]Doni Koesomo. *Pendidikan Karakter* (Jakarta: Grasindo, 2007) hlm. 3

kehadiran atau kurangnya kebajikan seperti empati, keberanian, ketabahan, kejujuran, dan kesetiaan, atau perilaku atau kebiasaan yang baik; atribut ini juga merupakan bagian dari *soft skill* seseorang. Karakter moral terutama mengacu pada kumpulan kualitas yang membedakan satu individu dari yang lain – meskipun pada tingkat budaya, kelompok perilaku moral yang dianut oleh kelompok sosial dapat dikatakan menyatukan dan mendefinisikannya secara budaya sebagai berbeda dari yang lain.[31]

Psikolog Lawrence Pervin mendefinisikan karakter moral sebagai "disposisi untuk mengekspresikan perilaku dalam pola fungsi yang konsisten di berbagai situasi".[32] Sama seperti, filsuf Marie I. George menyebut karakter moral sebagai "jumlah dari kebiasaan dan watak moral seseorang" Aristoteles telah mengatakan, "kita harus mengambil sebagai tanda keadaan karakter kesenangan atau rasa sakit yang terjadi pada tindakan".[33]

Remaja

Dalam mempelajari perkembangan remaja, remaja dapat didefinisikan secara biologis sebagai perubahan fisik yang ditandai oleh permulaan pubertas dan penghentian pertumbuhan fisik; secara kognitif, sebagai perubahan dalam kemampuan berpikir secara abstrak atau secara sosial, sebagai periode persiapan untuk menjadi orang dewasa. Perubahan pubertas dan biologis utama termasuk perubahan pada organ seks, tinggi, berat, dan massa otot, perubahan besar dalam struktur otak, serta perubahan suara. Kemajuan kognitif

[31]Yudi Latif, *Pendidikan Yang Berkebudayaan*, Cet. 2 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2020) hlm. 153.
[32]Lawrence A. Pervin, *Personality Stability, Personality Change, and the Question of Process* (Washington: American Psychological Association, 1997) hlm. 315-330
[33]Aristoteles, *Etika Nikomakea* (Jakarta: BASABASI, 2003) hlm. 67

mencakup peningkatan pengetahuan dan kemampuan berpikir secara abstrak dan bernalar secara lebih efektif[34].

Polemik Putusan Barak Militer dalam Pendidikan Ulang Karakter Remaja

Polemik putusan barak militer jika ditelusuri secara mendalam maka akan ditarik garis awal pada bulan Mei tahun 2025, tepat disaat putusan ini telah melalui pengesahannya di meja hijau

Kubu Pro

Pendapat akan putusan barak militer dari para tokoh pada kubu pro, kebanyakan berkonotasi ke persetujuan dan dukungan akan justifikasi ketertiban dalam pelaksanaan kebijakan barak militer. Pendapat-pendapat yang ada kemudian diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Efek Jera dan Pemutusan Mata Rantai Kriminalitas

Menjadi acuan penting akan hal ini adalah metode persuasif di sekolah telah gagal dalam menghentikan kekerasan ekstrim (tawuran senjata tajam) pada para murid sekalian. Dengannya dibutuhkan tindakan luar (*extern element)* untuk menghentikan impunitas remaja.

Dalam penjelasan lain menyatakan bahwa barak militer difungsikan sebagai “ruang isolasi produktif” bagi para remaja misorientasi untuk menjauhkan mereka dengan kelompok kriminal melalui intervensi institusional. Tokoh pendukung untuk pendapat ini adalah; Dedi Mulyadi, selaku inisiator kebijakan barak militer dan Dr. Tb. Ronny Nitibaskara, selaku guru besar Krimonolog[35]

[34]Jeffrey Jensen Arnett, “Emerging Adulthood: What Is It, What Is It Good For?. *“Journals Child Development Persepective,* Vol. 1, No. 2 (2007): 3-5
[35]Ronny Nitibaskara, *Penyimpangan Sosial dan Upaya Penanggulangannya.* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2025)

2. Pembentukan Resilensi dan Kedisiplinan Total

Melalui barak militer diharapkan dapat menghindarkan para generasi muda bangsa dari lemahnya daya juang (*adversity quontient*). Dengan melibatkan sistem aturan "konsekuensi fisik" sembari menanamkan etika kerja dan ketangguhan mental yang tidak didapatkan secara intensif di kurikulum sipil. Pengusung dalam pendapat di antara lain; Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko, selaku kepala staf TNI AD ke 28 di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. Dr. Irwan Prayitno, selaku guru besar di Universitas Muhammadiyah Jakarta bidang manajemen SDM[36]

3. Restorasi Nilai Patriotisme

Pembinaan siswa di barak militer diharapkan dapat mengubah loyalitas buta geng motor menjadi loyalitas terhadap negara (bela negara). Melihat bahwa degradasi nasionalisme merupakan ancaman eksistensial dan implementasi sistem barak militer yang menjadi pertahanan rakyat semesta, di mana para remaja dididik menjadi warga negara yang bertanggungjawab. Berikut merupakan para tokoh pendukung alasan ini; Mayjen TNI Dadang Arif Abdurrahman, Pangdam III/Siliwangi dan Komisi Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)[37]

4. Penyelamatan Ekosistem Pendidikan Formal

Tujuan yang dimaksudkan adalah; pemisahan siswa dengan risiko tinggi mengintimidasi dan merusak mentalitas belajar siswa lain di ekosistem sekolah asal. Dengan kata lain hak seorang siswa taat harus dilindungi dari gangguan

[36]Moeldoko, "Visi SDM Unggul 2025" (pidato kunci dalam Simposium Nasional Pembangunan Karakter Bangsa, Istana Negara, Jakarta, 20 Agustus 2025)
[37]Lembaga Ketahanan Nasional, *Laporan Kajian Strategis: Mitigasi Dekadensi Moral* (Jakarta: Kedeputian Pengkajian Strategik, Oktober 2025), hlm. 45-52.

distruptif. Pengabaian pelanggaran tanpa penanganan lebih lanjut dapat mengundang kerusakan berantai dalam ekosistem pembelajaran. Pendapat didukung oleh; Dinas Pendidikan Jawa Barat dan James Q. Wilson, Pencetus teori *broken windows*[38]

Kubu Kontra

Disisi lain, kubu kontra menjadi wadah bagi para ahli dan tokoh yang menyuarakan akan keberatan ataupun kritik akan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi seorang partisipan dan pelaksanaan kegiatan pedagogik dalam kebijakan barak militer. Pendapat-pendapat yang ada kemudian diklasifikan sebagai berikut:

1. Pelanggaran Hak Kontitusional dan Maladministrasi

Didasari pengiriman siswa ke barak militer tanpa disertai vonis pengadilan yang kemudian dianggap sebagai perampasan kemerdekaan dan melangkahi UU perlindungan anak. Hal ini diusung oleh; Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, selaku Direktur Jendral Hak Asasi Manusia dan Yusril Ihza Mahendra, selaku Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Indonesia[39]

2. Kegagalan Pedagogis

Disiplin yang dilahirkan di barak militer hanya sebatas kepatuhan semu. Seolah delusi yang mengekang kehendak bebas seorang siswa, menjadikannya patuh dan tunduk dalam waktu sementara dan tanpa kesadaran dari dirinya. Pendapat

[38]James Q. Wilson, *"The Police and Neightbourhood Safety"* [The Atlantic, Maret 1982] tersedia di situs:https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windows/304465/, diakses tanggal 22 Januari 2026
[39]Yusril Ihza Mahendra, "Kontitusionalitas Pelibatan TNI dalam Urusan Sipil", *Jurnal Hukum Pemerintahan* Vol. 14, No. 2 (2025): 7-8

dikemukakan oleh; Doni Koesoema Selaku pakar pendidikan karakter dan Paulo Freire, tokoh berpengaruh dalam pedagogi kritis[40]

3. Risiko Trauma Psikologis (PTSD)

Otak remaja dinilai terlalu rentan terhadap tekanan dan hantaman dari lingkungan agresif, sedangkan barak militer juga dinilai bukan sebagai tempat yang aman bagi tumbuh dan perkembangan jiwa. Maka diperlukannya "pendekatan hati" yang sesuai bagi setiap permasalahan yang ada. Menjadi tokoh pendukung pendapat yaitu; Ai Maryati Solihah, pemangku jabatan ketua KPAI dan Seto Mulyadi (kak seto), aktivis perlindungan anak[41]

4. Stigmatisasi Sosial dan Efek Labelling

Label "lulusan barak militer" menciptakan beban moral yang lebih besar dari apa yang dapat dipikirkan, label ini dapat memberi respon negatif hanya dengan menyebutkannya. Ketakutan akan *feedback* buruk dari masyarakat cenderung menjadikan perilaku mereka semakin sesuai dengan label tersebut. Sejalan dengan pendapat ini adalah tokoh Howard Becker, pencetus teori *Labelling* dan Retno Listyarti, pengamat dan pemerhati pendidikan Indonesia[42]

Kesimpulan

Putusan barak militer yang dikemukakan oleh Dedi Mulyadi dalam upaya mendidik ulang karakter remaja di area Jawa Barat pada akhirnya mengundang dan menarik perhatian

[40]Doni Koesoma, "Pendidikan Karakter: Utuh dan Menyeluruh," (Diskusi Publik ,Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 15 September 2025)
[41]Seto Mulyadi, "Pendekatan Humanis vs Militeristik," (Prosiding Konferensi Psikologi Anak Indonesia, Jakarta, Februari 2025) hlm. 18
[42]Howard Becker, *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance.* (New York: The Press of Glencoe, 1963)

begitu banyak ahli serta tokoh terkemuka. Perhatian tersebut kemudian menampar wajah pendidikan Indonesia secara luas, untuk kembali melihat kondisi generasi yang nanti akan menjadi penerus bangsa. Terlihat para tokoh pendukung putusan ini berharap dan menjadikan barak militer sebagai sarana refleksi dan pembentukan pribadi disiplin yang militan, sedangkan para ahli yang menolak putusan barak militer menyatakan akan ketakutan dari efek berkesinambungan yang buruk pada karakter remaja selaku peserta didik. Secara paripurna polemik ini meninggalkan pendapat-pendapat yang saling bertolak belakang dengan alasan dan dalih yang tak terbantahkan.

Pendidikan pesantren memberikan solusi lain dalam pendidikan ulang karakter remaja, di mana pribadi dan tingkah laku buruk akan dibenahi dengan disiplin ketat tanpa melupakan pengembangan moral spiritual dan psikologis remaja, yaitu model pendidikan berbasis pesantren. Tentunya dengan pengawasan dan tata kelola yang tepat dapat memujudkan generasi penerus bangsa yang penuh percaya diri, tidak terbebani beban moral dari stigma “lulusan pondok”, dan menjadi pribadi yang paham akan aturan bukan karena dirinya atapun hasil dari trauma psikologis miliknya. Diharapkan dalam penilitian lebih lanjut dapat mengkaji efektivitas model pendidikan pesantren dalam upaya mendidik ulang karakter remaja bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

Achlani, MA., "Peran Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Dakwah Sosial Dalam Menangkal Radikalisme dan Terorisme," *Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam* Vol. 1, No. 1 (2024): 2-3.

Aristoteles. *Etika Nikomakea* (Jakarta: BASABASI, 2003) hlm. 67

Arnett, Jeffrey Jensen, "Emerging Adulthood: What Is It, What Is It Good For?," *Journals Child Development Perspective*, Vol. 1, No. 2 (2007): 3-5.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Barak," *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, 2026, tersedia di situs: https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/barak, diakses tanggal 28 Februari 2026.

Becker, Howard, *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. New York: The Press of Glencoe, 1963.

Britannica Editors, "Barrack. Military Facilities Accommodations & Training" [Website Britannica 22 April 2026], tersedia di situs: https://www.britannica.com/topic/barracks, diakses tanggal 23 April 2026.

Brun, Jean Francois, "5 – Napoleon's Grande Armée from Part II - The State of the Armed Forces" [Cambridge.org, 20 Desember 2022], tersedia di situs: https://www.cambridge.org/core/books/abs/cambridge-history-of-the-napoleonic-wars/napoleons-grande-armee/BA2410C86533CB4F13B8DD98FAC4E903, diakses tanggal 28 Februari 2026.

CBC News Online, "INDEPTH: Female Soldier. Women in the Military-International" [CBC News 30 Mei 2006], tersedia di situs: https://web.archive.org/web/20130518040804/http://www.cbc.ca/news/background/military-international/, diakses tanggal 28 Februari 2026.

CNN Indonesia, "KPAI Desak Dedi Mulyadi Hentikan Pengiriman Siswa ke Barak Militer" [Berita Online CNN Indonesia 26 Maret 2025], tersedia di situs: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250526133607-20-1233264/kpai-desak-dedi-mulyadi-hentikan-pengiriman-siswa-ke-barak-militer, diakses tanggal 22 Januari 2026.

Doonderdag, "PARAMARIBO - Suriname gaat halverwege volgend jaar de militaire dienstplicht opnieuw invoeren" [Website NU 1 Oktober 2010], tersedia di situs: https://www.nu.nl/algemeen/2346876/suriname-voert-dienstplicht-weer-in.html, diakses tanggal 28 Februari 2026.

Enza, “Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kirim pelajar 'bandel' ke barak militer – Apa akibatnya?” [Berita Online BBC News Indonesia 6 Mei 2025], tersedia di situs: https://www.bbc.com/indonesia/articles/c7932qp4n2ro, diakses tanggal 22 Januari 2026.

Fahruzy, Khairul, et al., “Efektivitas Program Barak Militer Solusi Untuk Mengatasi Siswa/Remaja Bermasalah di Provinsi Jawa Barat,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* Vol. 10, no. 02 (2025): 1-3.

Farida, Galuh, “Dedi Mulyadi Akan Kirim Siswa Bermasalah ke Barak Militer” [Berita Online editorindonesia.com 2 Mei 2025], tersedia di situs: https://editorindonesia.com/mulai-2-mei-2025-dedi-mulyadi-akan-kirim-siswa-bermasalah-ke-barak-militer/, diakses tanggal 22 Januari 2026.

Firmansyah, Akmal, “Ide Wamil ala Dedi Mulyadi Bukan Solusi Bangun Karakter Pelajar” [Berita Online Tirto.id 28 Februari 2025], tersedia di situs: https://tirto.id/ide-wamil-ala-dedi-mulyadi-bukan-solusi-bangun-karakter-pelajar-g8RK, diakses tanggal 22 Januari 2026.

Guide Federal Record, “Records of the Selective Service System (World War 1)” [Website National Archive of the United States], tersedia di situs: https://www.archives.gov/research/guide-fed-records/groups/163.html, diakses tanggal 28 Februari 2026.

Jaya, Eris Eka, “30 Peserta Akan Jadi Percontohan Dedi Mulyadi Kirim Siswa ke Barak Militer” [Berita Online Bandung.Kompas.com 1 Mei 2025], tersedia di situs: https://bandung.kompas.com/read/2025/05/01/053143278/30-peserta-akan-jadi-percontohan-dedi-mulyadi-kirim-siswa-ke-barak-militer, diakses tanggal 22 Januari 2026.

Koesoma, Doni, “Pendidikan Karakter: Utuh dan Menyeluruh,” (Diskusi Publik, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 15 September 2025).

Kusumah A, Doni, *Pendidikan Karakter*. Jakarta: Grasindo, 2007.

Latif, Yudi, *Pendidikan Yang Berkebudayaan*, Cet. 2. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2020.

Lembaga Ketahanan Nasional, *Laporan Kajian Strategis: Mitigasi Dekadensi Moral*. Jakarta: Kedeputian Pengkajian Strategik, Oktober 2025.

Mahendra, Yusril Ihza, “Konstitusionalitas Pelibatan TNI dalam Urusan Sipil,” *Jurnal Hukum Pemerintahan* Vol. 14, No. 2 (2025): 7-8.

Mardianti, Dedi Leni, “Alasan Menteri HAM Dukung Program Dedi Mulyadi Kirim Anak Nakal ke Barak” [Berita Online Tempo 13 Mei 2025], tersedia di situs: https://www.tempo.co/politik/alasan-

menteri-ham-dukung-program-dedi-mulyadi-kirim-anak-nakal-ke-barak-1423932, diakses tanggal 22 Januari 2026.

Merdeka, "Profil Dedi Mulyadi" [Merdeka.com], tersedia di situs: https://www.merdeka.com/profil/indonesia/d/dedi-mulyadi, diakses tanggal 28 Februari 2026.

Merriam-Webster, "Barrack," *Merriam-Webster Dictionary*, 2026, tersedia di situs: https://www.merriam-webster.com/dictionary/barrack, diakses tanggal 28 Februari 2026.

Moeldoko, "Visi SDM Unggul 2025" (Pidato kunci dalam Simposium Nasional Pembangunan Karakter Bangsa, Istana Negara, Jakarta, 20 Agustus 2025).

Mujahidin, Irfan, "Peran Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pengembangan Dakwah," *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* Vol. 1, No. 1 (2021): 3-4.

Mulyadi, Seto, "Pendekatan Humanis vs Militeristik," (Prosiding Konferensi Psikologi Anak Indonesia, Jakarta, Februari 2025).

Muzaqi, Ahmad Rif'an, "Program Pembinaan Siswa di Barak Militer Dikritik, Dedi Mulyadi Ajak KPAI Terlibat Langsung" [Berita Online Fajar.co.id 19 Mei 2025], tersedia di situs: https://fajar.co.id/2025/05/19/program-pembinaan-siswa-di-barak-militer-dikritik-dedi-mulyadi-ajak-kpai-terlibat-langsung/, diakses tanggal 22 Januari 2026.

Nitibaskara, Ronny, *Penyimpangan Sosial dan Upaya Penanggulangannya*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2025.

Parhi, Nurmu'izzatin Zaharatul, "Analisis Gagasan Kang Dedi Mulyadi tentang Pendidikan Karakter Remaja melalui Model Barak Militer," *Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol. 13, no. 01 (2025): 1-3.

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan, Pengawasan, dan Pengendalian Usaha Warung Internet Serta Larangan Penyelenggaraan Usaha Game Online dan PlayStation di Kabupaten Purwakarta.

Pervin, Lawrence A., *Personality Stability, Personality Change, and the Question of Process*. Washington: American Psychological Association, 1997.

Priatmojo, Dedi, "Kencan Hingga Malam di Purwakarta Akan Dinikahkan Paksa" [Viva.co.id 2 September 2015], tersedia di situs: https://web.archive.org/web/20161114083444/http://nasional.news.viva.co.id/news/read/668800-kencan-hingga-malam-di-purwakarta-akan-dinikahkan-paksa, diakses tanggal 28 Februari 2026.

Roring, Edward Benedictus, “Tata Kelola dan Kebijakan Pengawasan Birokrasi Pemerintah Jawa Barat dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Anak di Barak Militer,” *Jurnal Perspektif Administrasi Publik dan Hukum* Vol. 2, no. 3 (2025): 3-6.

Saroh, Nailin In, “Dedi Mulyadi Tegaskan Program Barak Militer Bukan Pelatihan Barak Militer” [Berita Online voi.id 30 April 2025], tersedia di situs: https://voi.id/berita/479078/dedi-mulyadi-tegaskan-program-barak-pelajar-bukan-pelatihan-militer, diakses tanggal 22 Januari 2026.

Saroh, Nailin In, “DPR: Mengirim Siswa Bermasalah ke Barak Militer Bukan Jawaban, Butuh Pendekatan Holistik” [Berita Online voi.id 30 April 2025], tersedia di situs: https://voi.id/berita/479125/dpr-mengirim-siswa-bermasalah-ke-barak-militer-bukan-jawaban-butuh-pendekatan-holistik, diakses tanggal 22 Januari 2026.

Schultz, William J., et al., “A Good Place To Do Time? Detailing the Construction of Symbolic Social Boundaries in Correctional Boot Camps,” *Jurnal Criminal Justice and Behavior* Vol. 51, No. 4 (2024): 11-12.

Sutisna, Nanang, “Bupati Purwakarta Larang Wakuncar di Atas Jam 21:00” [Tempo.co 1 September 2015], tersedia di situs: https://web.archive.org/web/20160127195736/http://nasional.tempo.co/read/news/2015/09/01/058696810/bupati-purwakarta-larang-wakuncar-di-atas-pukul-21-00, diakses tanggal 28 Februari 2026.

Wilson, James Q., “The Police and Neighbourhood Safety” [The Atlantic, Maret 1982], tersedia di situs: https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windows/304465/, diakses tanggal 22 Januari 2026.